



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI MULIA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **635238**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.090.000.000

1. Tanah Seluas 4830 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 13400 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 13400 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 3400 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
8. Tanah Seluas 4553 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
9. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 115.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000



2. MOBIL, EXORA PROTON MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 95.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	165.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.349.432
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	5.382.849.432
III. HUTANG	Rp.	173.627.480
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.209.221.952

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.